

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal, pendapatan perkapita penduduk dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk serta adanya perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang.

Secara ringkas, pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu penduduk dalam sebuah negara meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Ada tiga hal yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu<sup>1</sup> :

1. Pembangunan sebagai suatu proses

Yang berarti bahwa pembangunan adalah suatu tahap yang harus dijalani dan dilalui oleh setiap masyarakat atau bangsa. Begitu juga dengan masyarakat atau penduduk suatu negara harus menjalani tahapan atau proses perkembangan agar mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman.

2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

---

<sup>1</sup> Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan, .... hal. 2*

Maksudnya ialah pembangunan merupakan salah satu tindakan positif atau suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Oleh karenanya peran serta masyarakat, pemerintah, juga semua elemen dalam suatu negara untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam sebuah proses pembangunan sangat dibutuhkan.

3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan melalui penanaman modal, manajemen, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan dan penambahan kemampuan berorganisasi. Dalam pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, juga sebaliknya, dalam pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar suatu proses pembangunan ekonomi.

Ekonomi pembangunan syariah adalah *konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor – faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah salallahualaihi wassalam.* Beberapa konsep dasar yang menjadi basis dalam ekonomi pembangunan syariah antara lain adalah konsep tauhid, khalifah dan tazkiyah dalam pembaangunan ekonomi, aspek pembangunan : fisik materiil, moral spiritual, fokus utama : manusia (subjek dan objek pembangunan) dan kesejahteraan sosial, serta peran negara.

Di dalam konsep ekonomi pembangunan syariah keseimbangan antara aspek materiil dengan moral merupakan sebuah keniscayaan. Keseimbangan ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, dan dapat menghantarkan manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya yang sesuai dengan sunnatullah kehidupan. Haambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan.<sup>2</sup> Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dihilangkan untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan, sebagai firman Allah SWT :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : “*Apa – apa (harta rampasan) yang diberikan Allah pada Rasul-Nya berasal dari penduduk kota – kota adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak – anak yatim, orang – orang miskin dan orang – orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang – orang kaya saja di antara kamu...*” (QS. Al-Hasyr/59:7)<sup>3</sup>

## **B. Industri Mikro dan Kecil**

### **1. Definisi Industri Mikro dan Kecil**

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada

---

<sup>2</sup> Irfan Syaqui Beik dan Lailiy Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 12

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Pentafsir Al-Quran, (SK Menteri Agama RI No.26 Tahun 1967)

seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri kecil mencakup semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar atau barang setengah jadi atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5 – 19 orang. Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1 – 4 orang.<sup>4</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Profil Industri Mikro dan Kecil 2017*, BPS RI

<sup>5</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting*, (Jakarta : LP3ES Anggota IKAPI, 2012), hal. 11

Pada Bab I pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah<sup>6</sup> :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk ekonomi produktif yang

---

<sup>6</sup> Feni Dwi Anggraeni dkk., *Jurnal Pengembangan UMKM Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, Universitas Brawijaya Malang.

dilakukan oleh orang perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, menggolongkan menjadi empat berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Yang pertama adalah industri rumah tangga apabila memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Kedua adalah industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 9 orang. Ketiga adalah industri sedang / menengah apabila memiliki tenaga kerja antara 10 hingga 99 orang. Terakhir adalah industri besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.<sup>7</sup>

Dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat, sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi titik sentral di dalamnya. Berdasarkan data Berita Statistik BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2010), dari total tenaga kerja usaha besar dan usaha kecil pada tahun 2010 sebanyak 102,2 juta orang, sekitar 99,4 juta orang (97,22%) berada pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Selain memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sektor UMKM juga memiliki peran dalam perekonomian nasional.<sup>8</sup>

Diakui, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan

---

<sup>7</sup> Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, hal. 5-6

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 3

ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar<sup>9</sup>.

Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil yaitu<sup>10</sup> :

1. Perusahaan dikelola oleh dirinya sendiri atau keluarga
2. Banyak yang tidak berbadan hukum
3. Dikelompokkan sebagai sektor informal
4. Lemah dalam tingkat pendidikan dan keterampilan
5. Lemah dalam mengeksplorasi kesempatan
6. Sangat terbatas dalam mengakses teknologi
7. Sangat terbatas dalam jejaring bisnis; terutama untuk akses permodalan dengan lembaga keuangan perbankan.

## **2. Pembinaan dan Pengembangan IKM**

Tambunan menerangkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki sejumlah program – program prioritas yang langsung bermanfaat bagi pengembangan IKM di sektor industri manufaktur dan sektor perdagangan. Program – program tersebut dibagi

---

<sup>9</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia...*, hal. 1

<sup>10</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomika Industri Kecil...*, hal. 66

kedalam sejumlah aspek, yakni pemasaran dan promosi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan proses produksi dan teknologi, sistem kredit finansial spesial untuk IKM, pengembangan infrastruktur dan lingkungan bisnis, pengembangan kemitraan, kapasitas pengembangan kelembagaan, dan program-program pendukung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Tugas tersebut dilakukan secara aplikatif seperti yang dituliskan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur yakni<sup>11</sup> :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Meningkatkan daya saing industri manufaktur melalui :
  - (1) Pengembangan industri kecil dan menengah
  - (2) Peningkatan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam
  - (3) Peningkatan kapasitas teknologi industri
  - (4) Peningkatan kualitas SDM
  - (5) Peningkatan standarisasi
- c. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor
- d. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi,

---

<sup>11</sup> Adhe Filima Fadrianto dan Mochammad Soe' oed Hakam, Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 58 No. 1 2018, hal. 149



memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.

- e. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

### 3. Perindustrian Dalam Perspektif Islam

Islam, menurut para ulama menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah dalam At – Taubah : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*(Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan)<sup>12</sup>, dan bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi ‘Subjek Perubahan’.*

Kesadaran untuk berkarya harus berlandaskan semangat tauhid. Sehingga semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah Swt (dalam rangka mencari keridlaan Allah Swt). Sebaliknya, setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk “karya nyata” yang bernilai positif. Karya bagi

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Pentafsir Al-Quran, (SK Menteri Agama RI No.26 Tahun 1967)

setiap Muslim adalah ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid.<sup>13</sup>

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah :

- a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata – mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.
- b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
- c. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.<sup>14</sup>

### **C. Tenaga Kerja**

Menurut UU No 13 tahun 2003 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Payaman Simanjuntak tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau

---

<sup>13</sup> Imam Kamaludi, *Perindustrian Dalam Pandangan Islam*, Vol. 7 No. 2, 2013, hal. 247

<sup>14</sup> Ibid., hal. 248

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>15</sup>

Jumlah penyerapan tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh: upah (dalam hal ini sudah dipengaruhi oleh unsur produktivitas dan inflasi), *output* (PDRB), *net migration* (dengan motivasi ekonomi), dan populasi. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja merupakan suatu rencana yang memuat pendayagunaan tenaga kerja yang optimum, efisien dan produktif guna pertumbuhan ekonomi / sosial secara nasional, sektoral dan regional yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pasar tenaga kerja merupakan suatu keadaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Pasar tenaga kerja sangat dinamik, karena setiap saat terjadi perubahan jumlah angkatan kerja, baik karena penambahan dari mereka yang baru lulus sekolah dan masuk ke dalam kelompok angkatan kerja ataupun pengurangan karena seseorang keluar dari kelompok angkatan kerja baik karena alasan *pension* dan lainnya.<sup>16</sup>

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor informal dan formal. Sektor formal atau sektor modern mencakup perusahaan – perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya

---

<sup>15</sup> Agusmidah, *Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, (Medan : USU Press, 2010), hal 5

<sup>16</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), hal. 207

berskala besar. Sebaliknya sektor informal merupakan sektor yang memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Kegiatan usaha umumnya sederhana
2. Skala usaha relatif kecil
3. Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha
4. Untuk bekerja di sektor informal biasanya lebih mudah daripada di sektor formal
5. Tingkat penghasilan umumnya rendah
6. Keterkaitan antar sektor informal dengan usaha lain sangat kecil
7. Usaha sektor informal sangat beraneka ragam. Dalam hal ini sektor informal merupakan indikasi dari UKM.

Pandangan ekonomi islam pada tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang – orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah sebagai berikut<sup>18</sup> :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

<sup>17</sup> Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi, 2011), hal 27

<sup>18</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoreti*, hal. 227

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”* (Q.S An-Nahl:97)<sup>19</sup>

#### **D. Ekspor**

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean suatu negara ke negara lain dengan memenuhi ketentuan berlaku. Hal yang harus diketahui atau dimiliki oleh eksportir adalah<sup>20</sup> :

1. Eksportir memiliki surat izin usaha perdagangan baik perorangan maupun badan hukum
2. Eksportir wajib mengetahui barang yang dilarang diekspor oleh pemerintah atau harus seizin pemerintah
3. Eksportir harus mengetahui ekspor barang ke suatu negara yang dilarang oleh pemerintah

Strategi pengembangan ekspor pada industri kecil yang dimaksudkan untuk mendorong industri agar tumbuh dan memberi manfaat bagi perekonomian nasional dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang terkait dengan faktor perilaku dan kinerja industri. Untuk perilaku industrial misalnya adalah dengan membuat regulasi harag di layanan – layanan publik seperti kereta api, pelabuhan, telekomunikasi, perlistrikan, perbankan dan asuransi.

---

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Pentafsir Al-Quran, (SK Menteri Agama RI No.26 Tahun 1967)

<sup>20</sup> Anton Yudi Setiano, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen*, (Jakarta : Sahabat, 2008), hal. 29

Insentif pajak yang mendorong ekspor juga perlu ditetapkan untuk mendorong industri nasional meningkatkan kemampuan ekspor. Adapun kinerja industri dapat diperbaiki dengan menetapkan regulasi keuntungan, persyaratan jasa layanan, insentif bagi kemajuan teknologi dan inovasi.<sup>21</sup>

Kegiatan ekspor – impor dalam bentuk primitif telah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat Quraaisy, ketika Allah mengingatkan mereka tentang salah satu nikmat besar yang Ia berikan kepada mereka. Yaitu dengan membiarkan mereka bebas berniaga ke Negeri Syam saat musim panas dan ke Negeri Yaman saat musim dingin. Semua itu dilakukan dengan perasaan aman karena mereka warga Tanah Suci Mekkah yang tidak akan diganggu oleh penyamun, lain halnya selain warga Tanah Suci. Oleh karenanya, nikmat yang besar ini Allah ingatkan kembali dalam firmannya :

وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوْلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا  
يُجِبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Bukankah kami telah menjadikan mereka kaum yang mapan di tanah suci yang aman? Dan dibawakan kepada mereka berbagai macam buah – buahan sebagai rezeki dari kami? Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-Qashash: 57)<sup>22</sup>*

<sup>21</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomika Industri Kecil*...., hal. 11

<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Pentafsir Al-Quran, (SK Menteri Agama RI No.26 Tahun 1967)

## E. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan. Pertumbuhan ekonomi menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan merupakan sebuah kata benda yang berkata dasar 'tumbuh'. Tumbuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti timbul, bertambah besar atau sempurna. Sementara pertumbuhan berarti hal (keadaan) tumbuh; perkembangan (kemajuan dan sebagainya). Pertumbuhan ekonomi dapat berarti kenaikan produk nasional bruto di suatu negara.<sup>23</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari pertumbuhan pendapatan perkapita besarnya adalah sama dengan pertumbuhan GNP dikurangi dengan pertumbuhan penduduk. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari pendapatan perkapita nilainya tidaklah sama dengan yang dihitung dengan menggunakan GNP, akan tetapi angka riil dari besaran pertumbuhan ekonomi tampak dari naik atau turunnya pendapatan perkapita.<sup>24</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan disini dapat berbentuk propinsi, kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi yang cukup

---

<sup>23</sup> Irfan Syauqi Beik dan Lailiy Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hal. 20

<sup>24</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Makro*, (Buku & Artikel, 2015), hal. 141

tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah disamping pembangunan sosial.

Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan.<sup>25</sup>

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional / Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka – angka pendapatan nasional / regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

---

<sup>25</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, (Niaga Swadaya, 2008), hal. 85



Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.<sup>26</sup>

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern, sistem sosial dan sikap masyarakat.

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan per kapita. Dalam Islam pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Namun, sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan dengan seiring. Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Publikasi BPS Provinsi Jawa Timur, *Produk Domestik regional Bruto Triwulanan Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2010 -2014*, <http://jaim.bps.go.id>

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 237

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu<sup>28</sup> :

a. *Investible resources* (sumber daya yang dapat diinvestasikan)

Yang dimaksud dengan *investible resource* ini adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Untuk SDA, maka SDA yang pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah-Nya di muka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan baik.

Adapun terkait dengan sumber daya modal, maka potensi dana yang bisa dioptimalkan antara lain adalah *saving rate* di suatu negara. *Saving rate* ini adalah proporsi dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi.

b. Sumber Daya Manusia dan *entrepreneurship*

Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneur* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah *entrepreneur* hingga 10% dan 4% dari jumlah penduduk mereka, Indonesia hingga tahun 2012 menurut

---

<sup>28</sup> Irfan Syauqi Beik dan Lailiy Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hal. 22

kementrian koperasi dan UKM, baru memiliki *entrepreneur* sebanyak 0,18% dari jumlah penduduk. Padahal para *entrepreneur* inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam membangun kemandirian ekonomi.

Kemandirian ekonomi ini dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi lokal dan pengembangan budaya bisnis syariah. Pada optimalisasi potensi lokal, yang menjadi parameternya adalah sejauh mana suatu bangsa mampu menggali, mengelaborasi dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Jangan mudah bergantung pada impor dan produk yang dihasilkan oleh bangsa lain. Ketergantungan yang tinggi pada pihak lain hanya akan membuat bangsa kita mudah dikendalikan oleh bangsa lain.

c. Teknologi dan inovasi

*Technological progress* disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Hapsari, Hakim, dan Soeaidy<sup>29</sup>. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui signifikansi hubungan antara pemberdayaan UKM dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Batu. Dan dilakukan pengujian secara bersama-sama dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kota Batu. Dan dari hasil pengujian secara parsial variabel jumlah UKM dan tenaga kerja UKM tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, sedangkan untuk variabel Modal UKM dan Laba UKM ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu. Persamaan penelitian dengan yang saya ambil adalah sama – sama menggunakan 1 variabel dependen yang mewakili konsep pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan 4 variabel independen yang mewakili konsep pemberdayaan UKM, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 1 variabel independen yaitu perkembangan Industri Mikro dan Kecil (IMK) (X1).

Penelitian yang dilakukan Raselawati<sup>30</sup>. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan metode data panel dengan *Fixed Effect Model*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDB UKM, tenaga kerja

---

<sup>29</sup> Pradnya Paramita Hapsari, dkk., *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)*, Vol. 17 No. 2, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2014.

<sup>30</sup> Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi, 2011).

UKM, ekspor UKM, jumlah unit UKM, dan investasi UKM dari tahun 2000 – 2009. Persamaan dengan penelitian yang saya ambil adalah penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih<sup>31</sup>. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui profil UKM di Indonesia, kesempatan kerja yang diberikan pada kegiatan UKM, dan sumbangan terhadap PDB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut adalah jumlah UKM yang paling banyak bergerak pada bidang perdagangan dan paling sedikit bergerak pada bidang listrik dan air bersih, dan sumbangan UKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 1.648.555.770.662. Persamaan penelitian dengan yang saya ambil adalah sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data Badan Pusat Statistik mengenai UKM. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis peranan UKM dalam perekonomian di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang yaitu menganalisis pengaruh perkembangan IMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan Rejekiingsih<sup>32</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur peranan industri kecil dalam perekonomian di Propinsi Jawa Tengah. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan

---

<sup>31</sup> Sri Wahyuningsih, *Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia*, (Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim), Vol. 5 No. 1 Tahun 2009

<sup>32</sup> Tri Wahyu Rejekiingsih, *Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil Dalam Perekonomian di Propinsi Jawa Tengah*, Vol. 1 No.2 Tahun 2004

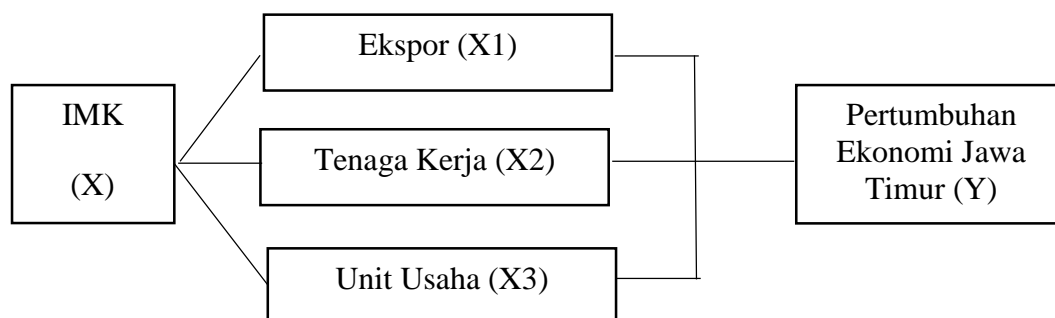
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Salah satu hasil dari pengukuran peranan industri kecil dalam perekonomian adalah kontribusi industri kecil terhadap PDRB masih kecil, karena nilai produksinya rendah. Persamaan penelitian dengan yang saya ambil adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan mengukur atau menganalisis pengaruh industri kecil dalam perekonomian di suatu daerah. Perbedaannya adalah wilayah penelitian sekarang di Propinsi Jawa Timur.

### G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan, maka kerangka konseptua penelitian dengan judul “Pengaruh Perkembangan Industri Mikro dan Kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 – 2017” dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

#### **Kerangka Konseptual**



#### **Keterangan :**

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual diatas adalah : variabel IMK (X) terdiri atas tiga faktor yaitu Ekspor (X<sub>1</sub>), Tenaga Kerja (X<sub>2</sub>), Unit Usaha (X<sub>3</sub>).

Ketiga faktor dari IMK, masing – masing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang dibuat. Dengan demikian hipotesis merupakan pernyataan tentative mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang ada.<sup>33</sup> Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
- H2 : Ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
- H3 : jumlah unit usaha berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
- H4 : Jumlah tenaga kerja, ekspor, dan jumlah unit usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>33</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hal. 135